



**LAPORAN**  
**PENGAWASAN PELAKSANAAN**  
**PROGRAM BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH (BIAS)**  
**DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN**  
**TANGGAL 19-21 SEPTEMBER 2024**

---

**A. PENDAHULUAN**

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 tercantum jelas bahwa salah satu cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa kesehatan adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar hal tersebut maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal, salah satunya dengan pendekatan promotif dan preventif melalui program imunisasi bagi anak. Pemberian imunisasi pada anak terbukti dapat memberikan perlindungan dari berbagai penyakit melalui vaksin seperti difteri, tetanus, campak, rubella, dan polio. Anak dengan status imunisasi dasar lengkap akan lebih sehat dan produktif. Selain itu, manfaat dari imunisasi juga jauh lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan di masa depan.

***Program Imunisasi dan Agenda Transformasi Sistem Kesehatan Nasional***

Belajar dari pandemi COVID-19, Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem kesehatan dengan melakukan transformasi sistem kesehatan nasional. Terdapat 6 pilar dalam agenda transformasi ini, yaitu (1) Transformasi Layanan Primer, upaya menciptakan layanan kesehatan yang berfokus pada pencegahan, (2) Transformasi Layanan Rujukan, upaya mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, (3) Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, upaya meningkatkan kemandirian nasional di sektor farmasi dan alat kesehatan, (4) Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan untuk mengoptimalkan pendanaan kesehatan, (5)

Transformasi SDM Kesehatan dengan meningkatkan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta (6) Transformasi Teknologi Kesehatan sebagai upaya mewujudkan digitalisasi system kesehatan dan meningkatkan inovasi teknologi kesehatan.

Program imunisasi merupakan salah satu bagian dari upaya promotive preventive sebagai salah satu program layanan primer. Imunisasi rutin merupakan program pemerintah yang berarti masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkan vaksin tersebut. 11 jenis vaksin yang sebelumnya digunakan antara lain:

1. Imunisasi dasar lengkap pada bayi usia 0-11 bulan
  - 1 Bulan : BCG Polio 1, mencegah penularan tuberculosis dan polio
  - 2 Bulan : DPT-HB-Hib 1 Polio 2, mencegah polio, difteri, batuk rejan, retanus, hepatitis B, meningitis, & pneumonia
  - 3 Bulan : DPT-HB-Hib 2 Polio 3
  - 4 Bulan : DPT-HB-Hib 3 Polio 4
  - 9 Bulan : Campak, mencegah campak
2. Imunisasi lanjutan bayi usia 18-24 bulan
  - Imunisasi DPT-HB-Hib 1 dosis, berfungsi untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis
  - Imunisasi campak rubella 1 dosis
3. Imunisasi lanjutan anak sekolah dasar pada program tahunan Bulan Imunisasi Nasional
  - Imunisasi campak rubella dan DT pada anak kelas 1
  - Imunisasi tetanus diphteria td pada anak kelas 2 dan kelas 5

Pada tahun 2023, Kementerian Kesehatan melakukan penambahan jumlah vaksin rutin wajib di Indonesia, dari 11 vaksin menjadi 14 vaksin. Ketiga vaksin ini yaitu vaksin Pneumococcal Conjugate Vaccine (PCV), vaksin Rotavirus, dan vaksin Human Papilloma Virus (HPV).

### ***Cakupan Imunisasi Lengkap Paska Pandemi COVID-19***

Pelaksanaan imunisasi sebagai program pelayanan kesehatan primer saat ini menjadi fokus pilar transformasi Kementerian Kesehatan. Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, terjadi penurunan cakupan imunisasi di tingkat global dari 86% pada tahun 2019 menjadi 81% pada tahun 2021 (WHO, 2021). Jumlah anak yang tidak mendapat imunisasi sejak tahun 2017-2021 sebesar 1,5 juta anak.

Penurunan juga dialami Indonesia dengan cakupan imunisasi dasar dari 93,7% pada tahun 2019 menjadi 84,5% pada tahun 2021 (WHO, 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, saat pandemi, terdapat sekitar 1,7 juta anak di Indonesia yang masih belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama pandemi COVID-19. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan rantai pasokan, aturan pembatasan

kegiatan, dan berkurangnya ketersediaan tenaga kesehatan, yang menyebabkan penghentian sebagian layanan vaksinasi pada puncak pandemi COVID-19.

Tahun 2022, Kementerian Kesehatan RI mencanangkan program BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang menurun signifikan akibat pandemi COVID-19. BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan Campak-Rubela serta melengkapi dosis Imunisasi Polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat. Program ini diwujudkan sebagai upaya menutup kesenjangan imunitas anak dengan melakukan harmonisasi kegiatan imunisasi tambahan (campak-rubela) dan imunisasi kejar (OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib).

### ***Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)***

Pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Koordinasi tersebut untuk memastikan setiap sekolah memasukkan agenda Bulanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimmunisasi anak-anaknya.

BIAS merupakan kegiatan nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak Sekolah Dasar (SD) sederajat yang dilaksanakan dua kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk imunisasi Campak, Rubela, dan Human Papiloma Virus (HPV). Sedangkan setiap bulan November untuk imunisasi Diphteria Tetanus (DT) dan Tetanus diphteria (Td).

Cakupan imunisasi rutin lengkap nasional perlahan kembali meningkat pasca pandemi COVID-19. Kini sekitar 94,9% anak-anak Indonesia telah diimmunisasi di tahun 2022, meningkat dari 84% di tahun 2019. Namun, masih ada sekitar 5% atau 240.000 anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan perlindungan tambahan dari imunisasi dasar lengkap. Artinya mereka masih berisiko tinggi terkena penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

### ***Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI***

Pelaksanaan program BIAS masih mengalami beberapa tantangan yang harus menjadi perhatian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Tantangan ini di antaranya adalah: persepsi negatif terhadap imunisasi rutin (banyaknya rumor terkait imunisasi: imunisasi tidak aman, vaksin tidak berkualitas, menyebabkan kemandulan dan autisme, dan lain-lain); kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama orangtua, yang kurang tentang pentingnya imunisasi; kapasitas dan pengelolaan rantai dingin vaksin yang

belum optimal; keterbatasan sumber daya penganggaran dan sumber daya manusia; dan kemampuan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), seperti polio, difteri, campak, pertusis dan lain sebagainya belum optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik terkait pengawasan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang dilakukan secara paralel ke 3 (tiga) daerah di Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama Kementerian Kesehatan RI, untuk melakukan upaya – upaya yang diperlukan agar cakupan imunisasi rutin secara lengkap dalam meningkat demi memenuhi hak setiap masyarakat tetap produktif serta anak Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.

## **B. LANDASAN**

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f.
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 26 Agustus 2024.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait Pelaksanaan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tahun 2024 di Kota Tangerang Selatan.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di tahun mendatang.

## **D. SASARAN**

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
2. Untuk mengetahui masukan dari seluruh pemangku kepentingan atas Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Kota Tangerang

Selatan sebagai bahan rekomendasi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BIAS di tahun-tahun mendatang.

#### **E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kesehatan Terkait Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah) 2024 ke Kota Tangerang, Provinsi Banten yaitu dengan melakukan pertemuan dengan Walikota Tangerang Selatan yang didampingi oleh:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan
5. Komisi Daerah (Komda) Kejadian Paska Ikutan Imunisasi Banten
6. Balai POM di Tangerang
7. Perwakilan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan
8. Perwakilan IDI Tangerang Selatan

Pendamping mitra dari pusat:

1. Kementerian Kesehatan RI (Direktorat Jenderal P2P, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes)
2. Badan POM RI
3. BPJS Kesehatan

#### **F. WAKTU PELAKSANAAN**

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 September 2024.

#### **G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK**

(terlampir)

#### **H. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

##### ***Pelaksanaan BIAS.***

Tahun 2023 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor IM.04.01/C/3418/2023 tentang Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan tahun 2024 surat edaran nomor IM.04.01/C/2086/2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Kota Tangerang Selatan melaksanakan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Jadwal pelaksanaan BIAS di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada:

- Bulan Agustus imunisasi MR Kelas 1
- Bulan Agustus imunisasi HPV kelas 5 Kelas 6 Putri
- Bulan November imunisasi DT kelas 1
- Bulan November imunisasi Td Kelas 2 dan 5

Sebelum pelaksanaan BIAS, Dinas Kesehatan mengajukan permohonan data sasaran dan dukungan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Data tersebut digunakan untuk Menyusun microplanning atau rencana kegiatan BIAS. Microplanning yang disusun terdiri dari pendataan sasaran siswa siswi SD/MI/ sederajat, perencanaan vaksin dan logistik, inventarisasi cold chain, jadwal pelaksanaan, rencana media komunikasi informasi dan edukasi dari Tingkat puskesmas sampai dengan Tingkat Kota.

Cakupan BIAS tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan

- Cakupan MR kelas 1= 27275 ( 96,4%)
- Cakupan DT kelas 1 = 27298 (96,5%)
- Cakupan Td kelas 2 = 27089 (96,5%)
- Cakupan TD kelas 5 = 25004 (96,5%)
- Cakupan HPV kelas 5 =12448 (96,9%)
- 

### ***Tantangan.***

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan BIAS tahun 2023 adalah penolakan yang muncul dari orang tua terkait dari efek samping vaksin dan kejadian Ikutan pasca Imunisasi BIAS dan juga adanya keraguan yang ada pada petugas dalam pemberian imunisasi BIAS terutama Antigen Baru.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan melakukan survey atau kunjungan ke lapangan (Monitoring) untuk mencari penyebab mengapa terjadi penolakan di masyarakat dan keraguan pada Nakes. Akhirnya di temukan ternyata masyarakat masih belum terinfo tentang manfaat dan efektifitas kerja vaksin.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan melakukan peningkatan dan penguatan kepada Petugas Pemberi Layanan Imunisasi BIAS dan juga turut serta melakukan pemantauan penyenggaraan Imunisasi BIAS. Sosialisasi Imunisasi ke masyarakat sebagai bentuk dari Promotif dan preventif terus kami galakkan. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini kader promotive turut kami libatkan dalam Upaya promotive dan preventif untuk meningkatkan cakupan imunisasi BIAS.

Selain itu, stok vaksin yang diberikan oleh Provinsi terkadang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang diminta karena ketersediaan stok yang tidak mencukupi.

***Pelaksanaan antigen baru program BIAS tahun 2023.***

Imunisasi antigen baru di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 adalah imunisasi HPV bagi siswa/siswi putri kelas 5 SD pada bulan Agustus. Cakupan Antigen Baru imunisasi HPV Tahun 2023 di Kota Tangerang Selatan adalah 108,68%

Rencana Strategi Peningkatan Cakupan Imunisasi :

- a. Edukasi kesehatan promotif preventif penguatan peran kader sebagai agen pemberdayaan kesehatan masyarakat.
- b. Penguatan kampanye-kampanye dan gerakan-gerakan terutama untuk program prioritas
- c. Penggunaan platform edukasi terintegrasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara luas.
- d. Diseminasi pertemuan (lintas sektor lintas program rumah sakit, klinik, puskesmas organisasi profesi, praktik dokter, praktik bidan, kecamatan, kelurahan, rw, rt, toma, toga).
- e. Surat permohonan dukungan ke lintas sektor dengan surat edaran
- f. Feedback evaluasi ke lintas sektor.

***Sistem pendistribusian vaksin.***

UPTD Puskesmas maupun Dinas Kesehatan menyusun Mikroplaning BIAS pada perencanaan vaksin dan logistic kemudian mengajukan Permohonan Kebutuhan Vaksin dan Logistik BIAS dengan surat permohonan dan permintaan melalui SMILE ke Dinas Kesehatan Provinsi. Pendistribusian vaksin dan logistic dari Dinkes Provinsi ke Kota Tangerang Selatan melalui Apalikasi SMILE dan UPTD Farmasi kemudian program imunisasi Dinas Kesehatan membuat nota Dinas tertuju ke UPTD Farmasi terkait Alokasi Vaksin dan Logistik Puskesmas. Puskesmas mengambil Vaksin dan Logistik sesuai Alokasi dari Dinas Kesehatan Ke UPTD Farmasi dengan membawa Surat Permintaan beserta coolbox yang di lengkapi cool pack dan alat pemantau suhu dan di entry pada aplikasi SMILE. Kemudian dilakukan Pemantauan suhu melalu lembar VAR (Vaccine Arrival Report) dan mencatat EVM (Effective Vaccine Management). Vaksin di Simpan pada Suhu 2-8 di kulkas Vaksin standard PQS (performance quality system) dan di pantau suhu melalui IoT logger dan di catat sehari 2x.

Sosialisasi program imunisasi di masyarakat. Tidak ada Kendala dalam mensosialisasikan program imunisasi. Tidak ada kelompok anti vaksin namun masih terdapat beberapa berita hoax yang beredar dimedia elektronik. Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus melakukan sosialisasi serta penyampaian media informasi tentang imunisasi.

***Vaksin kadaluarsa.***

Tidak ada vaksin kadaluarsa di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan maupun UPTD Puskesmas. Per tanggal 18 September tidak ada vaksin yang kadaluarsa. Stok vaksin BIAS yang tersedia:

1. HPV : ed Feb 2027
2. MR : ed April 2025
3. Td : Nov 2025
4. DT : Des 2025

Penanganan terhadap vaksin kadaluarsa sama dengan penanganan obat kadaluarsa karena vaksin termasuk ke dalam produk biologi. Limbah obat rusak atau kadaluarsa yang akan dimusnahkan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam kemasan utuh/cukup baik dapat dilakukan predestroy dengan cara mengeluarkan obat dari kemasan primer atau merusak kemasan primer atau sekunder jika pengeluaran obat menimbulkan dampak bagi kesehatan. Pelaksanaan pre-destroy bertujuan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan obat baik selama pengangkutan atau pada saat pemusnahan untuk disalurkan kembali atau digunakan produk obat ilegal atau palsu. Setelah proses pre-destroy, limbah diserahkan ke pihak ketiga dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan.

***Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).***

Tangerang Selatan memiliki 35 Puskesmas dan 32 Rumah sakit yang terdiri dari Dokter Umum 996 Perawat 3284 Bidan 1093. Berdasarkan data tersebut SDM Kesehatan pemberi layanan imunisasi di Kota Tangerang Selatan cukup. Di 35 Puskesmas Vaksin di simpan Pada Kulkas vaksin dengan standart PQS dan simpan pada suhu 2-8 serta termonitor 24 Jam melalui IoT logger secara Real Time dan tercatat pada aplikasi SMILE.

Kota Tangerang Selatan memiliki 35 Orang Pengelola Program Imunisasi di UPTD Puskesmas. Tahun 2023 sebanyak 15 Pengelola Program Imunisasi telah mendapatkan Pelatihan Pengelola Program Imunisasi Puskesmas di BKPK Kemenkes dan Tahun 2024 sebanyak 2 orang yang telah dilatih. Dinas Kesehatan melakukan Monitoring Pembinaan dan Evaluasi rutin kepada Pengelola Program Imunisasi.

***Hasil pengawasan oleh Balai Besar POM.***

Pengelolaan vaksin di Kota Tangerang Selatan sudah dilengkapi dengan SOP terkait Penyimpanan dan Pencatatan Vaksin. Proses penyimpanan sudah dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang dicatat 2x sehari. Saat pemeriksaan dilakukan suhu chiller memenuhi spesifikasi 2-8 °C. Beberapa chiller masih dalam proses dilengkapi dengan temperature data logger. Studi terkait verifikasi dan pemastian bahwa kondisi lingkungan selama proses pengangkutan produk terbukti optimal untuk menjaga kualitas produk perlu



dilakukan. Pencatatan pemeriksaan suhu produk CCP sebelum pengiriman dan saat penerimaan perlu didokumentasikan secara rutin. Prosedur yang ada belum mencantumkan terkait penanganan produk CCP tidak layak jual, reject, ED.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Balai POM di Tangerang terhadap beberapa Puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun 2024:

- Studi terkait verifikasi dan pemastian bahwa kondisi lingkungan selama proses pengangkutan produk terbukti optimal untuk menjaga kualitas produk perlu dilakukan
- Pencatatan pemeriksaan suhu produk CCP sebelum pengiriman dan saat penerimaan perlu didokumentasikan secara rutin
- Dokumentasi pencatatan harian monitoring suhu produk CCP perlu dicatat secara rutin

***Infrastruktur vaksin (rantai dingin).***

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Balai Besar POM di Serang tahun 2023 untuk Gudang Farmasi :

- Tersedia cold room 1 unit, beberapa chiller bukaan atas merk Dometic, chiller bukaan depan (showcase), dan chiller khusus untuk penyimpanan icepack dan coolpack.
- Kualifikasi terhadap seluruh tempat penyimpanan CCP masih perlu dilakukan.
- Beberapa chiller masih perlu dilengkapi dengan alat yang dapat memberikan peringatan suhu kritis agar mempercepat penanganan kondisi di luar spesifikasi yang dapat mempengaruhi mutu produk CCP.
- Tersedia genset manual untuk keadaan force majeure seperti pemadaman listrik.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh Balai POM di Tangerang terhadap beberapa Puskesmas di Kota Tangerang Selatan tahun 2024:

- Masing-masing Puskesmas telah tersedia chiller untuk penyimpanan produk CCP.
- Kalibrasi alat monitoring suhu diharapkan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

Penanganan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Sesuai dengan edaran HK.02.02/1/2287/2022 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi pada Bulan Imunisasi Nasional (KIPI BIAN) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, bahwa dikarenakan penjaminan KIPI BIAN dilakukan oleh Pemda dan/atau Kementerian Kesehatan, sehingga kepastian jumlah atau ada tidaknya pasien KIPI yang dirawat mungkin tervalidasi datanya tersedia di Pemerintah Daerah (Pemda). Terhadap kejadian kasus yang diduga KIPI khususnya KIPI BIAN, apabila dalam hasil akhir diagnosa oleh DPJP disebabkan KIPI maka penjaminan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), namun

apabila diagnosa DPJP bukan disebabkan pasca imunisasi maka dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan syarat peserta yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan. Ada Kejadian KIPI di Kota Tangerang Selatan Baik KIPI serius dan Non Serius.

- a. Pemantauan dan Penanggulangan KIPI di laksanakan melalui kegiatan surveilans KIPI dan Laman website Keamanan Vaksin.
- b. Setiap Kejadian KIPI selalu di laporkan ke web kemanan vaksin. Kota Tangerang Selatan memiliki POKJA Kipi yg tertuang pada Kepwal Kota Tangerang Selatan NOMOR 443.32/Kep.161-HUK/2021 yang di ketua oleh dr Monita Sp.Pd, dr Primitasari Sp.A.
- c. Hasil Investigasi Kasus KIPI dilaporkan berjenjang melalui Dinas Kesehatan Kota di laporkan Ke Pokja KIPI di teruskan Ke Komda KIPI Dinas Kesehatan Provinsi dan di lakukan Bedah Kasus oleh Komnas KIPI. Hasil Kajian KIPI akan di sampaikan melalui surat rekomendasi.
- d. Berdasarkan hasil kajian dan investigasi KIPI oleh Komnas Komda dan Pokja KIPI di simpulkan bahwa KIPI yang terjadi di Kota Tangerang Selatan merupakan ko-insiden atau tidak ada keterkaitan dengan vaksin
- e. .

***Masukan bagi pelaksanaan imunisasi.***

1. Ketersediaan Vaksin dan Logistik di distribusikan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan di Kota Tangerang Selatan.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Imunisasi dan vaksinator untuk meningkatkan keterampilan dan pelaksanaan Imunisasi.

**I. REKOMENDASI**

Berdasarkan diskusi, penjelasan dan jawaban tertulis, maka Komisi IX DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI segera menyelesaikan perangkat kebijakan dan juga mempersiapkan logistik dan vaksinnya untuk pelaksanaan vaksinasi HPV untuk umur 15 tahun di tahun 2024 dan mempersiapkan pelaksanaannya bersama pemerintah daerah.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengatasi stigma buruk dan berita HOAX terkait imunisasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik kepada masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI memperkuat sistem SMILE yang diharmoniskan dengan kebutuhan dan perencanaan program imunisasi di daerah sehingga vaksin dan logistic didistribusikan ke daerah sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan.

4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI, Badan POM RI dan BPJS Kesehatan memastikan monitoring KIPI berjalan dengan baik termasuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami KIPI tidak mengalami kendala.
5. Berdasarkan pembelajaran dari keberhasilan pelaksanaan program imunisasi di Kota Tangerang Selatan, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat infrastruktur dan SDM guna mendukung pelaksanaan BIAS di seluruh daerah, termasuk kendaraan untuk mendistribusikan vaksin dan rantai dingin (*cold chain*) agar distribusi vaksin dapat dilakukan dengan lancar dan kualitas vaksin tetap terjaga.
6. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi yang termasuk imunisasi program di fasilitas pelayanan kesehatan swasta, termasuk biaya yang dikeluarkan masyarakat dan pelaporan serta pencatatan vaksinasi yang dilakukan.

#### **J. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) ke Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ini kami susun. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 September 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI  
KE KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN  
KETUA**

**DR. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si**

**A-425**